

JURNAL ILMIAH
TANGROLEH PUTAI
Membangun Wawasan Berteologi Integralistik

Meretas
Jalan Baru
Berteologi

Strategi Pengembangan PAK

Aholiab Watloly

Strategi Pengelolaan Pendidikan Berbasis Kepulauan Di Maluku

Onisimus Amtu

Strategi Pembelajaran Di SM-TPI

(Suatu Kajian PAK Terhadap Tugas Pengasuh SM-TPI di Jemaat GPM Allang

Ravafie Sipahelut, Christiana Sahertian, Brangckly Picanussa

Guru PAK Seagai Penginjil Di Sekolah

Herlina Salhuteru, Christiana Sahertian, Samuel Sopakua

Merekonstruksi Teologi

Rukhama Arahala

Pluralisme dan Peranan Agama Dalam Kehidupan Manusia

Alce Sapulette

Bahan Ajar Model Jerrold E. Camp

Novita L. Sahertian

Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat

R. Souhaly

Agama Sebagai Salah Satu Sumber Konflik

S.M. E. Sahureka

Katekisasi

(Pergumulan dan Tantangan Bagi Gereja)

Christiana.D.W. Sahertian



JURNAL ILMIAH TANGKOLEH PUTAI

Membangun Wawasan Berkeologi Integralistik

Tangkoleh Putai, adalah bahasa suku Wemale di Pulau Seram. **Tangkoleh** adalah suatu lembaga pendidikan adat yang diikuti oleh laki laki wemale yang disebut *pa Manawa*, (laki laki perkasa) Pendidikan ini dapat diikuti setelah seseorang telah melewati ritus inisiasi, (Hawani). Pendidikan tangkoleh biasa diselenggarakan di hutan dalam waktu yang tidak ditentukan. Peserta pendidikannya diajarkan berbagai hal, mulai dari keterampilan kerja sampai pada aspek-aspek moral-etis, atau penurunan alihan nilai-nilai adat. Sedangkan **putai** menunjuk pada tempat berlangsungnya pendidikan tadi. Kata ini tidak sebatas menunjuk pada suatu lokasi geografis, tetapi tempat yang sudah ditetapkan secara khusus. Oleh sebab itu lingkungan ini dipandang sakral dalam adat setempat.

Penetapan nama **TANGKOLEH PUTAI** sebagai nama Jurnal Ilmiah STAKPN Ambon didasarkan pada pertimbangan kultural dan ilmiah. Pertimbangan kultural artinya, pendidikan dimanapun mesti bertumpu pada basis-basis kebudayaan masyarakat setempat. Ia pun harus mampu menjadi suatu lembaga pengembangan kebudayaan, dan bahkan pasang surut perubahannya juga sinergis dengan pasang surut perubahan kebudayaan. Di samping itu, keberadaan lembaga STAKPN di Ambon harus mampu secara signifikan membawa perubahan dan perkembangan dalam budaya pendidikan di Maluku. Suatu budaya pendidikan yang membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur. Alasan ilmiahnya ialah karena lembaga STAKPN Ambon berpacu mengembangkan pendidikan yang menuju pada pembentukan suatu teologi integralistik, mencakup seluruh aspek kehidupan dan kependidikan itu sendiri.

*Penanggung Jawab**R. Souhaly, SH., MH (Ketua STAKPN Ambon)**Redaktur Ahli:**Prof. DR. I.Nyoman S.Degeng, M.Pd. (Universitas Malang)**DR. R.Z. Titahelu, S.H (Samratulagi Menado)**Prof. Dr.Ir.Suhardjono, M.Pd, Dip. HE. (Universitas Brawijaya)**DR. H.L Sapulete (UKIM)**R. Souhaly, SH., MH (STAKPN AMBON)**Prof. DR. J.E. Lokolo, SH (UNPATTI)**S.E.M. Nirahua, SH, M.Hum (UNPATTI)**Prof. DR. A Watloty, S.PAK. M.Hum (UNPATTI)**Pemimpin Redaksi:**Drs. Nataniel Elake, M. Si**Sekretaris Redaksi:**DR. Christiana D. W. Sahertian, S.PAK, M.Pd**Redaksi Pelaksana:**Ny. H. Pesulima, S.Pd**Ny. F. Seitte, S.Si**Nn.F.L Elly, S.Pd**Editor:**Ny. A. Ch. Kakiay, S.Ag., M. Si**Layout/Composing:**DR. Christiana D. W. Sahertian, S.PAK, M.Pd**Administrasi:**Nn. J. Matital, S.Th**Bendahara:**Ny. Yenny Tomasila**Alamat Redaksi:**Kampus STAKPN Ambon, JL Halong Atas - Desa Halong Ambon, (0911) 353575***Catatan redaksi**

Redaksi menerima tulisan berupa artikel, hasil penelitian, opini dan esai, adalah gagasan orisinil penulis, sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.

Naskah di ketik dengan spasi ganda, pada kertas kuarto, font Time New Roman (12), dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Panjang 10-12 halaman sebanyak satu eksemplar disertai disketnya (lebih lanjut silahkan baca petunjuk bagi penulis pada halaman belakang).

JURNAL ILMIAH TANGKOLEH PUTAI

Membangun Wawasan Berteologi Integralistik

DAFTAR ISI

Strategi Pengembangan PAK <i>Aholiab Watloly</i>	01-06
Strategi Pengelolaan Pendidikan Berbasis Kepulauan Di Maluku <i>Onisimus Amtu</i>	07-17
Strategi Pembelajaran Di SM-TPI (Suatu Kajian PAK Terhadap Tugas Pengasuh SM-TPI di Jemaat GPM Allang <i>Ravafie Sipahelut, Christiana Sahertian, Brangckly Picanussa</i>	18-28
Guru PAK Seagai Penginjil Di Sekolah <i>Herlina Salhuteru, Christiana Sahertian, Samuel Sopakua</i>	29-42
Merekonstruksi Teologi <i>Rukhama Arahala</i>	43-50
Pluralisme dan Peranan Agama Dalam Kehidupan Manusia <i>Alce Sapulette</i>	51-58
Bahan Ajar Model Jerrold E. Camp <i>Novita L. Sahertian</i>	59-68
Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat <i>R. Souhaly</i>	69-78
Agama Sebagai Salah Satu Sumber Konflik <i>S. E. M. Sahureka</i>	79-88
Katekisasi (Pergumulan dan Tantangan Bagi Gereja) <i>Christiana.D.W. Sahertian</i>	89-98

STRATEGI PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEPULAUAN DI MALUKU

Onisimus Amtu
Dosen STAKPN Ambon

Abstrak: Konteks kepulauan di Maluku memerlukan pendekatan perencanaan pendidikan yang spesifik. Perencanaan dimaksud bersifat heterogen, karena memandang masing-masing pulau dengan karakteristik yang berbeda-beda. Aspek geografi, demografi dan sosial-kultur masing-masing daerah berbeda satu dengan yang lain. Daerah terpencil dan pulau-pulau terluar membutuhkan perlakuan khusus dalam perencanaan dan penerapan kebijakan pengelolaan pendidikan. Rentang kendali pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendidikan selama ini terkesan terabaikan. Dibutuhkan suatu strategi pengelolaan yang komprehensif dan sinergis untuk mempermudah masyarakat lokal mengakses pendidikan sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Strategi, Pengelolaan, Pendidikan, Kepulauan

I. PENDAHULUAN

Maluku merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang memiliki sebanyak 972 buah pulau besar maupun kecil dengan luas wilayah : 712.479,69 km, luas daratan : 54.185 km dan luas lautan : 658.294,69 km. Dengan luas lautan yang tidak seimbang dengan daratan (1 : 9), dipastikan akan menjadi kendala tersendiri dalam proses pengelolaan pendidikannya. Memang harus diakui bahwa dengan luas lautan yang dimiliki, tentu menjadi karakteristik tersendiri. Laut mengandung kekayaan alam yang tak akan habis digarap karena menjadi sumber pendapatan dan penghidupan masyarakat. Namun disisi lain menjadi kendala dalam proses pengorganisasian pendidikan. Konteks otonomi daerah yang kini diterapkan, ternyata semakin memperlebar jurang

pemisah antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Bagi kabupaten yang tingkat pendapatannya asli daerah (PAD)-nya tinggi, maka mungkin saja akan terlihat perkembangan strategi pendidikannya, tetapi bagaimana dengan kemajuan pendidikan kabupaten lainnya yang hanya bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat karena memiliki sumber daya alam yang minim?

Dengan karakteristik seperti itu, tentu dibutuhkan suatu perencanaan sistem pengelolaan pendidikan yang matang, terpadu, terencana dan berkesinambungan sehingga masyarakat dapat mengenyam pendidikan sebagaimana layaknya. Hak untuk mengenyam dan mengakses pendidikan adalah hak setiap warga negara. "Pendidikan nasional berfungsinya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Fungsi penyelenggaraan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, pada kenyataannya belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Bagi daerah-daerah yang memiliki daratan yang luas, tanpa terpisah oleh lautan serta memiliki akses jaringan komunikasi dan informasi yang memadai tentu sangat mudah merumuskan kebijakan pengelolaan pendidikannya. Tetapi kawasan kepulauan semisal Provinsi Maluku, membutuhkan kebijakan dan perencanaan pendidikan yang harus benar-benar dirasakan oleh semua komponen masyarakat. Kabupaten Maluku Tenggara Barat,² Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Kepulauan Aru; misalnya, memiliki tingkat kesukaran berbeda dengan Kota Ambon

¹. Bab II pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003

². Kabupaten MTB telah memekarkan lagi satu Kabupaten baru yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai UU No. 31 Tahun 2008. Kabupaten baru ini berada tepat diperbatasan antara Timor Leste dan Australia. Kondisi pendidikannya sangat memprihatinkan. Belum ada data terbaru pendidikan yang dapat dijadikan acuan, karena aktivitas pemerintahannya baru berjalan pada bulan September 2008.

dan atau Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Tenggara.

Mengapa? Sebab rentang kendali pelayanan, dan infrastruktur yang tersedia sudah sangat memadai sebagai induk kabupaten sebelum dimekarkan menjadi beberapa kabupaten. Sementara Kabupaten-kabupaten yang baru dimekarkan, yang sebelumnya bergantung pada kabupaten induk lalu menjadi terbengkalai. Jika dilihat secara kasat mata, pelaksanaan pembangunan nasional semenjak Orde Baru berkuasa belum dinikmati masyarakat Indonesia khususnya yang mendiami pulau-pulau kecil, termasuk di kawasan perbatasan. Mereka terisolir dari berbagai sentuhan perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perencanaan manajemen strategis untuk mengelola proses pendidikan di sana. Agak rumit memang jika mengurutkan permasalahan pokok mana yang perlu diprioritaskan diantara sekian banyak permasalahan yang kini belum tertanggulangi.

II. RENTANG KENDALI PELAYANAN

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki hamparan laut yang luas sebagai faktor pemisah antara satu pulau dengan pulau yang lain. Untuk menjangkau suatu pulau dibutuhkan sarana transportasi laut yang parmenen, karena iklim dan cuaca alam sangat mempengaruhi setiap aktivitas pelayanan. Masyarakat yang mendiami pulau-pulau yang jauh dari pusat pemerintahan, terkesan tidak diperhatikan. Hal ini dibuktikan dengan belum tersedianya sarana-prasarana baik berupa pembangunan jalan,

jembatan, dermaga dan sarana komunikasi yang memadai. Untuk menjangkau suatu pulau dibutuhkan perjalanan sehari-hari dengan menggunakan Kapal Perintis sebagai satu-satunya alat transportasi yang kini masih digunakan. Belum lagi kondisi alam dan cuaca buruk yang biasa berakibat fatal. Kondisi ini menyebabkan banyak pejabat pemerintah yang enggan berkunjung pada kawasan-kawasan dimaksud.

Hasil Sensus tahun 2000 menyebutkan; jumlah penduduk Provinsi Maluku sebanyak 1.200.000 jiwa. Sebagian besar penduduk daerah ini berdiam di wilayah pedesaan pada tahun 1995 : 75,43 %, umumnya terletak di pesisir pantai sedangkan yang berdiam di daerah perkotaan sekitar 24,57 %. Penyebaran penduduk tidak merata, dimana konsentrasi penduduk pada umumnya di pulau-pulau kecil seperti Ambon (Ibukota Provinsi Maluku), Kepulauan Lease, Kei Kecil dan sebagian pulau sedang dan besar dapat dikatakan jarang penduduknya.³ Akibatnya adalah untuk mengakses pendidikan, mereka harus berbondong-bondong menuju pusat-pusat pemerintahan baik di tingkat kabupaten maupun di ibukota provinsi. Dampak sosial yang muncul adalah terjadi kepadatan penduduk di perkotaan, sementara di desa terjadi kekosongan penduduk karena telah terjadi proses urbanisasi. Selain untuk lebih memacu pembangunan itu, diakui masih

terdapat kesenjangan-kesenjangan disebabkan oleh berbagai kendala, baik kendala keterbatasan dana maupun kendala-kendala geografis atau spasial mengingat luasnya negara kita dengan beribu pulau serta sarana komunikasi yang belum memadai. Ditambah pula dengan daerah perbatasan yang biasanya juga terpencil, masyarakat daerah ini kebanyakan tertinggal dari arus pembangunan.Disinilah diperlukan berbagai terobosan untuk menjangkau daerah-daerah tersebut, agar daerah-daerah itu dapat ikut serta sepenuhnya dalam proses akselerasi pembangunan nasional sehingga tidak akan semakin ketinggalan. (Tilaar, 2008:102-103). Salah satu faktor utama penyebab terjadinya kesenjangan dalam mengakses pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain adalah rentang kendali pelayanan, dan yang paling menentukan adalah merumuskan strategi pengelolaan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Aspek geografis di provinsi Maluku ternyata menjadi kendala utama dalam proses pengelolaan pendidikannya. Tentu masih ada faktor lainnya, diantaranya adalah kemampuan pendanaan, prasarana pendidikan yang belum memadai serta kebijakan pengelolaan dari instansi terkait.

III. STRATEGI PENGELOLAAN PENDIDIKAN

3.1. Strategi Kebijakan Anggaran

Kemajuan dalam dunia pendidikan dewasa ini selain ditopang dengan berbagai faktor, maka faktor ketersediaan anggaran sangat

³. BPS Maluku, Maluku Dalam Angka 2000

menentukan maju mundurnya pendidikan. Keinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mesti pula didukung dengan kemampuan anggaran yang memadai. Tanggungjawab pembiayaan pendidikan menempatkan Pemerintah sebagai pihak yang dominan selain masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya yang peduli terhadap pendidikan. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII, pasal 39 ayat 1, menyebutkan; Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). UU Sisdiknas sudah ditetapkan semenjak tahun 2003, namun kenyataannya sampai pada tahun 2008, alokasi 20% APBN maupun APBD belum terimplementasi. Komitmen Pemerintah untuk merealisasikan tuntutan UU Sisdiknas dimaksud agak cenderung terasa diakhir 2008, sesuai Pidato Kenegaraan Presiden menyongsong Kemerdekaan RI ke-63 di depan Paripurna DPR RI, tanggal 16 Agustus 2008.

Jika bentuk penganggaran pendidikan masih bersifat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maka prospek pendidikan kita terkesan "berjalan ditempat". Otonomisasi juga menjadi kendala di daerah-daerah dalam mengelola anggaran pendidikannya. Bagi daerah-daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya baik, maka dipastikan porsi anggaran pendidikannya mengalami peningkatan di dalam APBD. Tetapi

bagaimana dengan daerah-daerah yang PAD-nya sangat minim dan hanya bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat? Jika ditopang dengan 20% APBN dan APBD, dan pengawasan penggunaan anggaran dimaksud berjalan dengan baik, maka mungkin saja terjadi perubahan dalam iklim pendidikan di Indonesia, ini bergantung pada keseriusan pemerintah. Menurut Darmaningtyas, 2008:8 "Pada kenyataannya, banyak pemerintah daerah yang sama sekali tidak memperhatikan pendidikan di daerahnya. Selain ditunjukkan melalui anggaran pendidikan yang rendah, anggaran yang ada juga terfokus untuk pembangunan fisik (rehab gedung) karena pembangunan fisik itulah yang dapat mempercepat pengembalian modal untuk menjadi bupati/walikota."

3.2. Strategi Kebijakan Kurikulum

Kurikulum pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan, karena sangat dipengaruhi oleh politik penguasa. Setiap kali terjadi pergantian Menteri, terjadi pula perubahan kurikulum. Sangat sulit menilai kemajuan dan perkembangan pendidikan, karena kurikulum sebelumnya secara umum dianggap masih relevan, tetapi dikemudian hari mengalami perubahan. Bab X, pasal 36 UU Sisdiknas 2003 menegaskan;

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta

didik. (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan akhlak mulia; c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; i) dinamika perkembangan global; dan j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Secara konseptual, kurikulum pendidikan nasional kita baik jika diterapkan secara terencana dan berkelanjutan dengan memperhitungkan kondisi daerah-daerah. Sepertinya kualitas pendidikan kita ditentukan oleh kandungan kurikulum, namun pada kenyataannya ditentukan oleh keinginan setiap penguasa yang menganggap konsep sebelumnya tidak lagi relevan. Di sini mulai terjadi distorsi kebijakan pendidikan, karena menganggap kondisi suatu daerah sama dengan daerah lainnya. Menurut Sutjipto, 2008:5:

Dalam bidang manajerial distorsi akan menjadi lebih parah jika siklus manajerial, yaitu plan-do-check-action dalam menangani sistem pendidikan tidak dilakukan dengan baik. Kurikulum diubah dengan dasar tanpa evaluasi, tetapi berdasarkan preference para pengambil keputusan di belakang meja. Konsep-konsep pembaruan pendidikan tidak didasarkan atas analisis keadaan nyata yang akurat dan kebutuhan di lapangan, misalnya

menganggap bahwa semua sekolah sudah memiliki jaringan internet sehingga disediakan buku elektronik.

Kurikulum kita berskala nasional, namun mesti pula mempertimbangkan kondisi daerah-daerah kepulauan, baik yang ada diperbatasan maupun yang terpencil. Jika tidak, maka gagasan dasar yang akan dicapai dalam kurikulum kita tidak maksimal dalam capaiannya. Daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau yang jauh dari jangkauan informasi hingga kini masih menggunakan kurikulum lama (kurikulum 1994, 2004, KBK), sementara kini sudah diberlakukan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Kurikulum terbaru membutuhkan sosialisasi dan pelatihan guru sebelum dilaksanakan dalam bentuk belajar-mengajar. Mulyono, 2008; mengusulkan ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi: Perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi kegiatan tentang pendataan mata pelajaran/mata kuliah yang diajarkan/dipasarkan, waktu jam yang tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan, kegiatan belajar-mengajar, buku-buku yang dibutuhkan, program semester, evaluasi program tahunan, kalender pendidikan, perubahan kurikulum maupun inovasi-inovasi dalam pengembangan kurikulum.

3.3. Strategi Kebijakan Distribusi Tenaga Pendidik

Berkaca pada konteks kepulauan dengan tingkat kesulitan masing-masing, mekanisme penyaluran tenaga pendidik pada sejumlah daerah

terpencil di Maluku mengalami kendala. Ditemukan bahwa ada oknum guru yang setelah diterima dalam proses seleksi menjadi CPNS, menolak menempati lokasi sekolah yang jauh terpencil, dengan alasan tidak ada akses komunikasi dan sarana transportasi yang sulit untuk menjangkau daerah tersebut. Dampaknya adalah di sejumlah ibukota kabupaten terjadi penumpukan tenaga guru, sementara di kawasan-kawasan terpencil terjadi kekosongan guru. Hingga kini masih dijumpai sejumlah SD dan SMP yang hanya memiliki 2-4 tenaga guru. Jika seorang guru ditempatkan di tingkat Kecamatan, pertanda ia memiliki kualitas dan pada waktunya dapat menduduki jabatan strategis semisal; Kepala Sekolah, Pengawas, atau pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) setempat.

Sebaliknya bagi tenaga guru yang bermasalah dan cenderung tidak bekerja sama, ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Kalau itu yang terjadi selama kurun waktu Indonesia Merdeka, bagaimana mungkin kualitas pendidikan kita bisa dikatakan mengalami peningkatan. Sekolah-sekolah di kota dan pinggiran kota memiliki jumlah guru yang melebihi bidang studi dan beban mengajar, sementara di tempat lain 1-3 mata pelajaran diasuh hanya oleh seorang guru, sekalipun guru yang bersangkutan tidak memiliki kualifikasi pada bidang studi yang diajarkan.

Pengadaan dan penempatan guru haruslah merupakan satu paket. Artinya tenaga guru untuk daerah tersebut dipersiapkan dalam satu program secara cermat, baik dalam jumlah maupun kualifikasi fisik dan psikis dalam suatu

program khusus. Masalah pengadaan dan penempatan guru memang merupakan masalah nasional. Di satu pihak terdapat kelebihanguru, di pihak lain terdapat kekurangan guru yang akut dalam satu provinsi sampai pada tingkat Kabupaten/Kodya dalam provinsi itu. Tentunya terdapat banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan pengadaan dan penempatan guru terutama di daerah terpencil. Tilaar, 2008:114

Oleh karena itu dibutuhkan suatu perencanaan strategis dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk merumuskan kebijakan pengadaan dan penempatan tenaga guru secara merata di semua kawasan dan daerah terpencil. Penempatan tenaga guru sebetulnya berdasarkan kualifikasi yang dimiliki serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Proses monitoring dan evaluasi serta supervisi secara sinergis dan simultan oleh dinas terkait akan memungkinkan proses perumusan kebijakan distribusi guru berjalan dengan baik.

3.4. Strategi Kebijakan Penyediaan Sarana-prasarana pendidikan

Kenyataan membuktikan bahwa jika suatu daerah tidak memiliki akses informasi dan jarang disentuh pembangunan, maka sarana-prasarana yang dimiliki sangat tidak memadai. Jika realitas itu dicermati secara mendalam, maka masyarakat setempat dalam mengakses pendidikan selalu mengalami ketertinggalan dengan daerah lainnya. Daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau diperbatasan mengalami hal yang sama. Jangankan

sarana pendidikan, infrastruktur yang mendukung akses masyarakat dengan dunia luar belum dibangun, misalnya; jalan, jembatan, dermaga laut, sarana komunikasi-informasi dan sebagainya. Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, dan peralatan pendidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah sebagai sarana dan prasarana umum pada sebuah lembaga pendidikan. Dalam hal ini ada dua sarana dan prasarana tersebut berupa, pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan gedung, serta penyediaan lahan bagi lembaga yang akan berdiri adalah diselenggarakan oleh pemerintah. ...Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai dalam PBM. (Mulyono, 2008:184)

Merujuk pada pendapat di atas, ternyata kondisi gedung baik SD dan SMP sangat memprihatinkan karena hanya mengandalkan konstruksi bangunan yang telah ada sebelumnya tanpa dipikirkan untuk di bangun baru atau diusulkan dalam perencanaan. Sarana belajar berupa perpustakaan, laboratorium, alat peraga, dll; belum diperhatikan. Kondisi ini seperti yang digambarkan di atas, diperparah dengan otonomi daerah, sehingga kewenangan pengelolaan pendidikan diberikan kepada daerah, pada kenyataannya daerah yang baru dimekarkan sangat sulit menghidupi dirinya sendiri. Kita patut berterima kasih kepada yayasan-yayasan pendidikan yang dikelola

Gereja, karena membuka sekolah-sekolah SD, SMP dan SMA semenjak awal dan dikemudian hari sebagian ditingkatkan statusnya menjadi negeri dan dikelola oleh pemerintah.

3.5. Strategi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan

Jika pada proses penyediaan sarana prasarana pendidikan tidak diperhatikan, dan mekanisme distribusi tenaga guru tidak merata, bagaimana mungkin mutu pendidikan bisa ditingkatkan. Adalah sebuah keniscayaan jika kita berharap adanya suatu perubahan dalam pendidikan, sementara tidak dirancang dan dikelola serta ditunjang sebagaimana layaknya. Belum lagi suatu kurikulum tersosialisasi dengan baik, sudah diganti dengan kurikulum baru. Standar mutu yang ditargetkan belum dicapai, sudah diganti dengan standar mutuyang baru. Kualitas mutu pendidikan sangat ditentukan oleh perbaikan-perbaikan dan layanan yang diberikan. Bagaimana dengan manajemen mutu pendidikan kita di Indonesia? Menurut Sallis, 2008; Pendidikan adalah tentang pembelajaran masyarakat. Jika Total Quality Management (TQM) bertujuan untuk memiliki relevansi dalam pendidikan, maka ia harus memberi penekanan pada mutu pelajar. Lebih lanjut, Sallis menegaskan:

Total Quality Management (TQM) memerlukan perubahan kultur. Ini terkenal sulit diwujudkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. TQM membutuhkan perubahan sikap dan metode. Staf dalam institusi harus memahami dan melaksanakan pesan moral TQM agar bisa membawa dampak. Bagaimanapun juga,

perubahan kultur tidak hanya bicara tentang merubah perilaku staf, tapi juga memerlukan perubahan dalam metode mengarahkan sebuah institusi. (Sallis, 2008:78).

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di kawasan pulau-pulau, aspek geografis, demografis dan kultur masyarakat setempat patut diperhitungkan. Pemerintah wajib melibatkan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan di daerahnya. Baik pemerintah pusat maupun daerah harus serius memikirkan kebijakan yang relevan dengan konteks masyarakat yang bermukim di pulau-pulau terpencil. Bagaimana mereka mengkases pendidikan dengan kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang disediakan. Perlakuan khusus ini disadari secara perlahan akan mengangkat derajat kemanusiaan mereka melalui pendidikan.

3.6. Strategi Kebijakan Pengawasan dan Evaluasi

Salah satu kegagalan dari upaya pencapaian mutu pendidikan kita adalah kurangnya pengawasan dan evaluasi. Baik pengawasan melekat (waskat) sampai pada pengawasan terpadu (wasdu) selalu menggunakan kultur birokrasi yang rumit. Para perancang kebijakan selalu di belakang meja dan menerima laporan dari bawahan. Kebijakan pengawasan bukan sekadar dalam penggunaan anggaran pendidikan, namun yang terpenting pula adalah pengawasan terhadap kinerja organisasi sekolah pada satuan-satuan pendidikan. Setiap laporan dan temuan sebetulnya adalah bahan

evaluasi untuk menelaah kebijakan sebelumnya. Setiap kali melaksanakan Ujian Nasional, hasilnya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk merumuskan kebijakan. Ini penting sehingga mutu dan kualitas pendidikan dapat selalu dipertahankan dan atau bahkan perlu ditingkatkan. Secara Nasional, mated Ujian yang disusun tentu diasumsikan bahwa semua siswa dalam setiap satuan pendidikan telah mempelajarinya, padahal di sejumlah daerah belum tentu. Alhasil, prosentase kelulusan pada sejumlah satuan pendidikan begitu memprihatinkan. Di sejumlah kawasan tertinggal dan kepulauan, tingkat kelulusannya drastis sampai 0, %. Menurut Sallis, 2008;

Sistem mutu selalu membutuhkan rangkaian umpan balik. Mekanisme umpan-balik harus ada dalam sistem mutu. Hal tersebut bertujuan agar hasil akhir sebuah layanan bisa dianalisa menurut rencana. Pengawasan dan evaluasi adalah elemen kunci dalam perencanaan strategis. Jika sebuah institusi mau belajar dari pengalaman dan tidak statis, maka proses evaluasi dan umpan-balik harus menjadi elemen yang esensial dalam kulturnya.

Untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi, Sallins, 2008:236 mengetengahkan 3 level yaitu; Segera, Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

Segera; melibatkan pemeriksaan harian terhadap kemajuan pelajar. Tipe pengawasan ini biasanya berlangsung formal, dan dilakukan oleh individu-individu guru atau pada tingkat tim. Jangka Pendek; membutuhkan cara yang lebih terstruktur dan spesifik, yang menjamin bahwa pelajar sudah berada dalam jalur yang seharusnya dan sedang meraih potensinya. Tujuan

evaluasi pada tingkat ini adalah untuk memastikan perbaikan bagi segala sesuatu yang harus diperbaiki. Penggunaan data statistik dan profil pelajar harus ditonjolkan dalam proses ini. Evaluasi ini dilakukan dalam level tim dan departemen. Evaluasi Jangka pendek dapat digunakan sebagai sebuah metode kontrol mutu yang menyoroti kesalahan dan masalah. Penekanannya perbaikan sebagai cara mencegah kegagalan pelajar. Jangka Panjang; adalah sebuah evaluasi terhadap kemajuan dalam mencapai tujuan strategis. Evaluasi merupakan evaluasi yang dipimpin langsung oleh institusi secara keseluruhan. Tipe evaluasi ini dilakukan sebagai sebuah usaha pembuka dalam memperbarui rencana strategis.

Sekalipun pendapat Sallins masih sebatas pada evaluasi hasil belajar siswa, namun prinsip seperti itu sangat cocok untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap faktor lainnya misalnya; pengelolaan keuangan, mutu guru, kesejahteraan guru, sarana prasana pendidikan, dan lain-lain sebagainya.

3.7. Strategi Kebijakan Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Guru

Sebetulnya kualitas pendidikan sangat bergantung pula pada guru. Jika guru tidak bermutu, bagaimana muridnya bisa bermutu. Di daerah-daerah terpencil dan kepulauan, sebagian besar guru hanya berpendidikan SPG, SGO, PGA, D2 dan D3, sementara hanya sebagian kecil yang mengenyam pendidikan sarjana SI. Bagi yang berijazah SI biasanya mereka ditempatkan di kawasan

perkotaan atau kecamatan, sementara yang lainnya ditempatkan di desa-desa. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan: Pasal 8, Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9, Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 10, (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Jika mendasarkan pada ketentuan UU No. 14 Tahun 2005 itu, sebagian besar guru belum layak melaksanakan tugas dan kewajiban mereka. Jika tuntutan itu hendak dipenuhi dengan jalan melanjutkan pendidikan profesionalnya, maka yang menjadi korban adalah siswa. Pendidikan profesional dimaksud ditempu melalui belajar di Perguruan Tinggi, dan itu berarti mereka harus berbondong-bondong meninggalkan masing-masing satuan pendidikannya untuk meraih gelar SI atau D4 di Kota. Jadi selain mereka harus meraih gelar akademik yang sesuai dengan profesinya, mereka juga seharusnya melakukan studi banding pada sejumlah daerah yang telah maju dalam pengelolaan mutu pendidikannya. Menurut Sallins, 2008:208-209;

"dalam pendidikan, ada beberapa contoh standarisasi yang bisa digunakan untuk menguji dan melatih perkembangan staf. Guru dengan

mudah bisa mengunjungi institusi lain di daerah tertentu dan melihat bagaimana institusi tersebut berjalan. Mereka bisa mengetahui praktek terbaik dan yakin bahwa standarisasi mereka sesuai dengan prakteknya, dan kemudian berupaya untuk meningkatkannya. Standarisasi adalah usaha menetapkan standar yang digunakan untuk mengukur prestasi. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara mencari institusi terbaik dari sebuah kompetisi serta memahami cara mereka dalam menghasilkan mutu."

Kebijakan lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas guru adalah kesejahteraannya. Gaji dan tunjangan profesionalnya dibayarkan oleh pemerintah. Tetapi pada daerah kepulauan sentralisasi pembayaran hak-hak guru cenderung tersendat akibat rentang kendali dan cuaca alam. Bendaharawan gaji di tingkat kecamatan harus melakukan transaksi di tingkat kabupaten dan itu membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya gaji dan tunjangan guru biasanya tertunda 1-2 bulan. Bagaimana mungkin mereka melaksanakan tugas dengan baik, jika pada jam-jam sekolah digunakan juga untuk melaut dan atau mengerjakan kebun. Peningkatan mutu pendidikan dikembalikan lagi pada kebijakan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru.

IV. PENUTUP

Otonomi Daerah dengan segala konsekwensinya telah berdampak bagi dimensi pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat. Satuan pendidikan (Dasar dan Menengah yang dikelolah sebelumnya oleh Pemerintah

Pusat (kecuali Pendidikan Tinggi), diserahkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Semenjak itu bayang-bayang keprihatinan terhadap mutu pendidikan di daerah mulai nampak. Bagi daerah yang memiliki pendapatan maksimal dan mengalokasikan anggaran pendidikannya besar, memacu peningkatan kualitas pendidikan. Sementara di Maluku yang kini diterpa dengan "nuansa pemekamn kabupaten" melahirkan sejumlah permasalahan baru di bidang pengelolaan pendidikan. Sejumlah Kabupaten yang baru dimekarkan, ditambah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang minim, terpaksa mengelola proses pendidikannya dengan seadanya, sambil bergantung pada "belas kasihan" Pemerintah Pusat.

Merancang suatu strategi pengelolaan pendidikan berbentuk kepulauan seperti di Maluku, memerlukan berbagai pendekatan yang sifatnya komprehensif. Mengapa? Karena masing-masing daerah memiliki spesifikasi dan karakteristik yang berbeda-beda. Kawasan Maluku Tengah (Seram, Lease, Buru dan Ambon), tentu berbeda dengan kawasan Maluku Tenggara (Kei, Aru, Tanimbar, Babar, Kisar dan Wetar). Oleh karena itu strategi pengelolaan pendidikannya mesti terfokus pada: Strategi Kebijakan Anggaran, Strategi Kebijakan Kurikulum, Strategi Kebijakan Distribusi Tenaga Pendidik, Strategi Kebijakan Penyediaan Sarana-prasarana pendidikan, Strategi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan, Strategi Kebijakan Pengawasan dan Evaluasi, dan Strategi Kebijakan Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Guru. Tinggal satu hal, keseriusan Pemerintah baik

pusat maupun daerah untuk mengimplementasikan anggaran 20% sesuai tuntutan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Jika komitmen ini benar-benar dijabarkan di setiap satuan pendidikan pada daerah terpencil dan pulau-pulau, maka secara berangsur-angsur kualitas pendidikan kita akan meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

- Biro Pusat Statistik Maluku, 2000; *(Provinsi Maluku Dalam Angka)*
 UU No. 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*
 UU No. 14 Tahun 2005 *tentang Guru dan Dosen*
 Darmaningtyas, 2008 : *Mengkritik Kebijakan Otoritas Pengelolaan Pendidikan di Daerah* (Makalah Seminar Nasional Pendidikan, PPs UNNES)
 Sutjipto, 2008; *Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan* (Makalah Seminar Nasional Pendidikan, PPs UNNES)
 Tilaar, H.A.R, 2008; *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung
 Mulyono, 2008 : *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta
 Sallis, Edward, 2008; *Total Quality Management in Education* (Manajemen Mutu Terpadu), Yogyakarta, cetakan ke-VII